PERKEMBANGAN ANTROPOLOGI HUKUM DALAM SUDUT PANDANG PLURALISME HUKUM

Nama Mahasiswa : Tessya Putri Permata Sari
Email:tessyaputri89@gmail.com
No BP: 1910003600569
Perguruan Tinggi : Universitas Ekasakti Padang

A. PENDAHULUAN

Antropologi hukum dalam kajiannya mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan fenomena - fenomena sosial secara empiris dalam kehidupan masyarakat, seperti hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat, atau bagaimana hukum bekerja sebagai alat pengendalian sosial (*social control*) atau sarana untuk menjaga keteraturan sosial (*social order*) dalam masyarakat. Dalam perjalanan sejarah bahwa awal pemikiran antropologi tentang hukum dimulai dengan studi-studi yang dilakukan oleh kalangan ahli antropologi dan bukan dari kalangan sarjana hukum. Awal kelahiran antropologi hukum biasanya dikaitkan dengan karya klasik Sir Henry Maine yang bertajuk *The Ancient Law* yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1861, beliau dipandang sebagai peletak dasar studi antropologi tentang hukum melalui introduksi teori evolusionistik (*the evolutionistic theory*) mengenai masyarakat dan hukum, yang secara ringkas menyatakan : hukum berkembang seiring dan sejalan dengan perkembangan masyarakat, dari masyarakat yang sederhana/bersahaja (*primitive*), tradisional, dan kesukuan (*tribal*) ke masyarakat yang kompleks dan modern, dimana hukum yang *inherent* dengan masyarakat semula menekankan pada *status* kemudian wujudnya berkembang ke bentuk kontrak.

Pada dekade tahun 1960-an tema studi - studi antropologi lebih memberi perhatian pada fenomena kemajemukan hukum atau pluralisme hukum. Tema pluralisme hukum pertama -

tama difokuskan pada kemajemukan cara - cara penyelesaian melalui mekanisme tradisional, tetapi kemudian diarahkan kepada mekanisme dan institusi penyelesaian sengketa menurut hukum pemerintah kolonial dan pemerintah negara – negara yang sudah merdeka. Karya Bohannon, Gluckman, dan Gulliver misalnya, tidak secara sistematis memberi perhatian pada eksistensi mekanisme dan institusi penyelesaian sengketa menurut hukum kolonial dan hukum Negara - negara sedang berkembang,

Fenomena pluralisme hukum merupakan fakta hukum dalam masyarakat multikultural. John Griffiths (2006) mendefinisikan pluralisme hukum sebagai suatu situasi di mana dua atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial yang sama. Hooker (1975) menegaskan, dalam pluralisme hukum harus ada interaksi antara berbagai hukum yang beragam itu. Yang menjadikan pluralisme hukum penting untuk dikaji, bukanlah karena keragaman sistem hukum itu, melainkan karena fakta dan potensinya untuk saling berkompetisi hingga menciptakan ketidakpastian.

Konsepsi pluralisme hukum menghendaki pendekatan keberagaman dalam hukum karena konteks pluralitas masyarakat dalam bentuk suku bangsa, budaya, ras, agama, kelas dan jenis kelamin. Pluralisme hukum dipahami sebagai interaksi, saling pengaruh dan saling adopsi antara berbagai sistem hukum negara, adat, agama dan kebiasaan-kebiasaan lain yang dianggap sebagai hukum. Konsepsi pluralisme hukum menegaskan bahwa masyarakat memiliki cara berhukumnya sendiri yang sesuai dengan rasa keadilan dan kebutuhan mereka dalam mengatur relasi-relasi sosialnya. Pluralisme hukum berbeda dengan pendekatan hirarkhi hukum yang menjadi ciri khas dari positivisme hukum dan sentralisme hukum. Pluralisme hukum memandang bahwa semua hukum adalah sama dan harus diberlakukan sederajat.

B. PEMBAHASAN

Antropologi Hukum sebagai ilmu dipengaruhi oleh Antropologi dan Ilmu Hukum, sehingga sebagai “anak”, ia memiliki “bapak” Antropologi dan “ibu” Ilmu Hukum, maka memahami Antropologi dan Ilmu Hukum adalah prasyarat untuk dapat mengerti Antropologi Hukum. Antropologi Hukum sebagai Ilmu mempelajari perilaku manusia dengan segala aspeknya yang terkait dengan norma-norma hukum tertulis dan tidak tertulis secara empiris. Melalui studi - studi antropologi mengenai sistem pengendalian sosial (*social control*) di berbagai komunitas masyarakat di dunia, kalangan ahli antropologi memberi kontribusi yang sangat penting dan bermakna dalam pengembangan konsep hukum yang secara nyata berlaku dan dioperasikan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini karena para ahli antropologi mempelajari hukum bukan semata-mata sebagai produksi dari hasil abstraksi logika sekelompok orang yang diformulasikan dalam bentuk peraturan perundang - undangan, tetapi lebih mempelajari hukum sebagai perilaku sosial. Dimana hukum dalam perspektif antropologi dipelajari sebagai bagian yang integral dari kebudayaan secara keseluruhan, karena itu hukum dipelajari sebagai produk dari interaksi sosial yang dipengaruhi oleh aspek- aspek kebudayaan yang lain, seperti politik, ekonomi, ideologi, religi. Hukum dipelajari sebagai proses sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, hukum dalam perspektif antropologi bukan semata - mata berwujud peraturan perundang - undangan yang diciptakan oleh Negara (*state law*), tetapi juga hukum dalam wujudnya sebagai peraturan - peraturan lokal yang bersumber dari suatu kebiasaan masyarakat (*customary law*), termasuk pula di dalamnya mekanisme - mekanisme pengaturan dalam masyarakat (*self regulation*) yang juga berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*legal order*).

Ideologi sentralisme hukum diartikan sebagai suatu ideologi yang menghendaki

pemberlakuan hukum negara (*state law*) sebagai satu - satunya hukum bagi semua warga masyarakat, dengan mengabaikan keberadaan sistem - sistem hukum yang lain, seperti hukum agama, hukum kebiasaan, dan juga semua bentuk mekanisme - mekanisme pengaturan lokal yang secara empiris berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Griffiths (1986:12), menegaskan sentralisme hukum cenderung mengabaikan kemajemukan sosial dan budaya dalam masyarakat, termasuk di dalamnya norma - norma hukum lokal yang secara nyata dianut dan dipatuhi warga dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan sering lebih ditaati dari pada hukum yang diciptakan dan diberlakukan oleh negara (*state law*). Karena itu, pemberlakuan sentralisme hukum dalam suatu komunitas masyarakat yang memiliki kemajemukan sosial dan budaya hanya merupakan sebuah kemustahilan.

Konsep pluralisme hukum yang dikemukakan Griffiths pada dasarnya dimaksudkan untuk menonjolkan keberadaan dan interaksi sistem - sistem hukum dalam suatu masyarakat, antara hukum negara (*state law*) dengan sistem hukum rakyat (*folk law*) dan sistem hukum agama (*religious law*) dalam suatu kelompok masyarakat. Kenyataan memperlihatkan, bahwa hukum menjadi salah satu produk kebudayaan yang tidak terpisahkan dengan segi-segi kebudayaan yang lain, seperti politik, ekonomi, struktur dan organisasi sosial, ideologi, religi. Untuk memperlihatkan keterpautan hukum dengan aspek-aspek kebudayaan yang lain, maka menarik untuk mengungkapkan teori hukum sebagai suatu sistem (*the legal system*) yang diintroduksi pendapat Friedman seperti berikut:

1. Hukum sebagai suatu sistem pada pokoknya mempunyai 3 elemen, yaitu (a) struktur sistem hukum (*structure of legal system*) yang terdiri dari lembaga pembuat undang-undang (legislatif), institusi pengadilan dengan strukturnya, lembaga kejaksaan dengan strukturnya, badan kepolisian negara, yang berfungsi sebagai aparat penegak hukum;

(b) substansi sistem hukum (*substance of legal system*) yang berupa norma - norma hukum, peraturan - peraturan hukum, termasuk pola - pola perilaku masyarakat yang berada di balik sistem hukum; dan (c) budaya hukum masyarakat (*legal culture*) seperti nilai - nilai, ide - ide, harapan - harapan dan kepercayaan - kepercayaan yang terwujud dalam perilaku masyarakat dalam mempersepsikan hukum.

2. Setiap masyarakat memiliki struktur dan substansi hukum sendiri. Yang menentukan apakah substansi dan struktur hukum tersebut ditaati atau sebaliknya juga dilanggar adalah sikap dan perilaku sosial masyarakatnya, dan karena itu untuk memahami apakah hukum itu menjadi efektif atau tidak sangat tergantung pada kebiasaan - kebiasaan (*customs*), kultur (*culture*), tradisi - tradisi (*traditions*), dan norma - norma informal (*informal norms*) yang diciptakan dan dioperasionalkan dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dengan mengkaji komponen struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum sebagai suatu sistem hukum, maka dapat dicermati bagaimana suatu sistem hukum bekerja dalam masyarakat, atau bagaimana sistem - sistem hukum dalam konteks pluralisme hukum saling berinteraksi dalam suatu bidang kehidupan sosial (*social field*) tertentu. Kultur hukum menjadi bagian dari kekuatan sosial yang menentukan efektif atau tidaknya hukum dalam kehidupan masyarakat; kultur hukum menjadi motor penggerak dan memberi masukan-masukan kepada struktur dan substansi hukum dalam memperkuat sistem hukum. Kekuatan sosial secara terus menerus mempengaruhi kinerja sistem hukum, walaupun kadang - kadang dapat merusak, memperbaharui, memperkuat, atau memilih lebih menampilkan segi - segi

tertentu, sehingga untuk mengkaji komponen substansi, struktur, dan budaya hukum berpengaruh terhadap kinerja penegakan hukum, maka dapat dipahami suatu situasi bagaimana hukum bekerja sebagai suatu sistem dalam kehidupan masyarakat.

Karakter khas lain dari antropologi hukum adalah berbagai sistem hukum dalam masyarakat di berbagai belahan dunia di- pelajari dengan memfokuskan pada proses- proses mikro (*micro processes*) yang secara empiris berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, metode holistik dalam mengkaji pluralisme hukum dalam masyarakat sangat memhantu menjelaskan mekanisme, prosedur, dan institusi-institusi hukum serta keterkaitannya dengan aspek politik, ekonomi, religi, organisasi sosial, ideologi. Implikasi dari karakteristik meto- dologi antropologi hukum seperti disebutkan di atas adalah : jika studi - studi mengenai fenomena hukum dalam masyarakat dilakukan untuk memperoleh pemahaman secara utuh menyeluruh dan holistik, maka studi antropologi hukum harus difokuskan paling tidak pada empat aspek kajian pokok sebagai satu kesatuan, yaitu mulai dari kajian :

1. Proses Pembuatan Hukum (Law Making Process);
2. Norma Hukum / Peraturan Perundang- undangan (Legal Norms);
3. Pelaksanaan Hukum (Law Implemen- tation/Application); dan
4. Penegakan Hukum (Law Enforcement).

Kajian pada tingkatan proses pembuatan hukum akan memberi pemahaman bagaimana petarungan berbagai kepentingan ekonomi, politik, sosial, religi, termasuk ideologi partai dan tekanan dunia internasional (Negara - negara / lembaga - lembaga internasional) mempengaruhi masa – masa perdebatan dan pengambilan keputusan untuk menyetujui (dari lembaga legislatif) dan mensahkan (dari lembaga eksekutif) suatu produk hukum negara (*state law*). Selain itu, akan diamati dan dicermati apakah proses pembuatan hukumnya sudah melalui mekanisme yang

benar, seperti dimulai dengan membuat background paper, naskah akademik, baru kemudian menyusun rancangan undang-undangnya; apakah kemudian dalam proses tersebut dilakukan konsultasi publik (*public consultation*) oleh eksekutif dan dengar pendapat (*hearing*) sebagai cerminan dari prinsip transparansi dan partisipasi publik dengan melibatkan semua komponen *stakeholders* sebelum persetujuan oleh legislatif dan pengesahan oleh eksekutif dilakukan. Dengan demikian, proses – proses tersebut dan pertarungan kepentingan yang mendominasi proses tersebut dapat diketahui secara eksplisit memberi warna dan nuansa, jiwa dan semangat dari produk hukum yang dihasilkan seperti tercermin pada asas dan norma - norma hukumnya. Kajian pada tingkatan norma - norma hukumnya, produk peraturan perundang - undangan, akan memberi pemahaman mengenai jiwa dan semangat serta prinsip - prinsip yang dianut dari suatu produk hukum / peraturan perundang - undangan. Kaitan dengan studi antropologi hukum yang berfokus pada pluralisme hukum, akan dicermati apakah prinsip - prinsip penting, seperti: *informed-consent principle*, prinsip pengakuan dan perlindungan atas hak-hak masyarakat lokal (*indigenous tenurial rights*), dan prinsip pengakuan atas kamajemukan hukum (*legal pluralism*) sudah diatur secara eksplisit dalam norma - norma hukumnya.

C. PENUTUP

Dari penjelasan mengenai perkembangan antropologi hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa ilmu antropologi hukum pada dasarnya adalah sub disiplin ilmu hukum empiris yang memusatkan perhatiannya pada studi-studi hukum dengan menggunakan pendekatan antropologis. Pada fase awal perkembangan antropologi hukum pendapat yang sangat dominan disini adalah yang menyatakan bahwa hukum itu berkembang sejalan dengan perkembangan

hidup masyarakat. Fase selanjutnya perkembangan antropologi hukum telah mengkaji mengenai kemajemukan atau pluralisme hukum dalam masyarakat. Hal terjadi karena hukum bukan semata-mata sebagai suatu produk dari individu atau sekelompok orang dalam bentuk peraturan perundang-undangan, atau bukan sebagai suatu institusi yang terisolasi dari aspek-aspek kebudayaan yang lain, tetapi hukum merupakan produk dari suatu relasi sosial dalam sistem kehidupan masyarakat. Karena itu, hukum muncul sebagai fakta khas yang lebih menekankan empiris, ekspresi, atau perilaku sosial masyarakat, dan penyelesaian kasus sengketa merupakan ekspresi dari hukum yang secara nyata berlaku dalam masyarakat. Ciri khas yang lain dari antropologi hukum adalah penggunaan pendekatan holistik (*holistic approach*) dengan selalu mengkaitkan fenomena hukum dengan aspek - aspek kebudayaan yang lain, seperti ekonomi, politik, organisasi sosial, religi, ideologi. Dalam investigasi analisis bekerjanya hukum dalam masyarakat. Selain itu, metode perbandingan hukum (*comparative method*) juga menjadi ciri khas antropologi hukum, dengan melakukan studi perbandingan antara sistem - sistem hukum dalam masyarakat yang berbeda - beda di berbagai belahan dunia. Dalam kaitan dengan yang disebut terakhir, hukum adat di Indonesia tidak sama dengan antropologi hukum, karena hukum adat hanya salah satu dari sistem hukum rakyat (*folk law* atau *customary law*) yang menarik untuk dikaji melalui studi antropologi hukum, seperti juga sistem - sistem hukum rakyat asli (*indigenous law*) yang dapat ditemukan di Malaysia, Philipina, Thailand, Nepal, India, Australia, Amerika Latin, Afrika. Jadi, hukum adat (*adat law*) adalah sistem hukum khas Indonesia yang dapat dijadikan objek kajian untuk memahami sistem hukum rakyat yang secara empiris hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai cerminan pluralisme hukum dalam masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, Volume 47, Nomor 1, 2018. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.10-21>
- Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 201. <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>.
- Laurensius Arliman S, Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa, Padjadjaran Journal of Law, Volume 4, Nomor 3, 2017. <https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.3433>.
- Laurensius Arliman S, Penanaman Modal Asing Di Sumatera Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Supremasi Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2018. <http://dx.doi.org/10.36441/hukum.v1i01.102> .
- Laurensius Arliman S, Memperkuat Kearifan Lokal Untuk Menangkal Intoleransi Umat Beragama Di Indonesia, Ensiklopedia of Journal, Volume 1, Nomor 1, 2018, <https://doi.org/10.33559/eoj.v1i1.18>.
- Laurensius Arliman S, Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional, Kertha Patrika, Volume 39, Nomor 3, 2017, <https://doi.org/10.24843/KP.2017.v39.i03.p03>.
- Laurensius Arliman S, Partisipasi Masyarakat Di Dalam Pengelolaan Uang Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jurnal Arena Hukum, Volume 12, Nomor 2, 2019, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.5>.
- Laurensius Arliman S, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia, Dialogica Jurnalica, Volume 11, Nomor 1, 2019, <https://doi.org/10.28932/di.v1i1.1831>.
- Laurensius Arliman S, Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional, UIR Law Review, Volume 2, Nomor 2, 2018, [https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2\(02\).1587](https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2(02).1587)
- Laurensius Arliman S, Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia, Doctrinal, Volume 1, Nomor 2, 2016.
- Laurensius Arliman S, Ni Putu Eka Dewi, *Protection of Children and Women's Rights in Indonesiathrough International Regulation Ratification*, Journal of Innovation, Creativity and Change Volume 15, Nomor 6, 2021.
- Laurensius Arliman S, *Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian Dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianisme*, Jurnal Yuridis, Volume 3, Nomor 2, 2016, <http://dx.doi.org/10.35586/v3i2.180>.
- Laurensius Arliman S, Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0, Jurnal Ensiklopedia Sosial Review, Volume 2, Nomor 3, 2020..